

Judul : Kinerja Anggota Dewan: Perlu Ada Laporan Berkala kepada Publik
Tanggal : Kamis, 06 Desember 2018
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 2

Kinerja Anggota Dewan Perlu Ada Laporan Berkala kepada Publik

[JAKARTA] Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mendorong Kesekjenan DPR, Mahkamah Kehormatan DPR (MKD), dan pimpinan dewan proaktif memberikan laporan berkala kepada publik soal kinerja para anggota dewan selama musim kampanye.

Laporan ini, kata dia, bisa menjadi referensi bagi pemilih untuk menilai performa DPR petahana.

Sebanyak 529 atau 94% dari total 560 anggota DPR periode 2014-2019 kembali mencalonkan diri pada Pemilu Legislatif 2019. Sebanyak 349 di antaranya menempati nomor urut 1 di sejumlah daerah pemilihan sehingga peluang besar untuk terpilih kembali.

"Perlu ada laporan kinerja anggota DPR secara berkala sehingga masyarakat di dapil mendapatkan informasi yang cukup dan memadai soal kinerja dan kerja-kerja wakil rakyat mereka di parlemen agar bisa mengambil keputusan yang tepat soal pilihan caleg khususnya dalam menilai kelayakan petahana apakah patut dipilih kembali atau tidak," ujar Titi di Jakarta, Kamis (6/12).

DPR, kata Titi, harus menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga mereka yang memang sudah sangat terpuruk. Kalau dibiarkan, menurut dia, bukan hanya membuat kredibilitas DPR makin jatuh, tapi juga bisa membuat apatisme publik untuk berpartisipasi pada proses politik dan juga pandangan mereka pada urgensi keberadaan lembaga ini sebagai institusi demokrasi.



Titi Anggraini

Titi menilai, salah satu hambatan paling nyata pemilih adalah hambatan informasi terhadap rekam jejak para calon.

"Kebanyakan pemilih merasa tidak mendapatkan informasi yang memadai soal kinerja anggota dewan yang mewakili mereka di parlemen. Padahal banyak cara yang bisa dilakukan termasuk menggunakan alat bantu teknologi informasi dan mengintensifkan penggunaan medsos untuk menginformasikan kinerja para anggota parlemen terhadap kinerja mereka," tutur dia.

Lebih lanjut, Titi mengatakan ada penyakit kambuhan yang biasa dialami anggota DPR memasuki masa kampanye, yakni sering turun ke dapil untuk melakukan kampanye Pileg dan Pilpres 2019. Belum ada efek jera yang bisa membuat mereka mengubah pola perilaku dalam menjalankan kerja-kerja parlemen. Mereka tidak



Lucius Karus

jera karena belum ada mekanisme tegas pengenaan sanksi yang bisa menjerat mereka sebagai anggota parlemen terkait buruknya kinerja. "Mereka (DPR) juga menganggap masyarakat atau pemilih tidak akan

mengetahui sepak terjang mereka di parlemen karena mereka selalu ada di dapil dan berinteraksi dekat dengan rakyat," jelas dia.

Interaksi dengan rakyat selama musim kampanye dianggap bisa menutupi soal kinerja DPR di parlemen. Pasalnya, kehadiran di masyarakat sendiri sudah merupakan bagian dari kamuflase bahwa mereka sedang bekerja. Padahal saat itu, bukan masa reses atau pun kunjungan lapangan.

"Untuk itu harus ada koreksi dan evaluasi internal dari kelembagaan DPR untuk memperbaiki ini.

Pimpinan DPR, pimpinan fraksi, sekretariat jenderal dan juga alat kelengkapan terkait, utamanya MKD harus mengambil inisiatif untuk memperbaiki situasi ini. Kalau tidak, kondisi kerja dan kinerja parlemen akan semakin menurun dan membuat segala target kerja dan capaian parlemen meleset," pungkias dia.

Sarana Demokratis

Peneliti Formappi Lucius Karus menilai pemilu merupakan sarana demokratis untuk menentukan wakil rakyat atau pemimpin eksekutif. Sebagai momentum pemberian mandat, pemilu harus menjadi momentum untuk memberikan *punishment and reward* kepada wakil rakyat yang sudah menjabat dan maju kembali.

Pemilih harus menjadikan faktor kinerja dan integritas sebagai pertimbangan memilih. Anggota DPR yang kinerja dan integritasnya baik perlu diberi *reward* oleh pemilih dengan memilihnya kembali. Sementara yang sebaliknya, diberikan *punishment* dengan tidak memilihnya lagi.

"Karena DPR 2014-2019 tercatat berkinerja rendah yang di antaranya disebabkan oleh minimnya tingkat kehadiran anggota dalam rapat-rapat, maka semestinya

Kehadiran Anggota DPR dalam Sidang Paripurna Masa Sidang 16 Agustus – 31 Oktober 2018

Fraksi	Jml Anggota Kehadiran	Rata2 %
PDI-P	109	46
Golkar	91	40
Gerindra	73	26
Demokrat	61	23
PAN	48	17
PKB	47	15
PKS	40	16
PPP	39	15
Nasdem	36	14
Hanura	16	5
Total	560	216
		39

Foto: ANTARA

“Rakyat yang menderita justru menunggu pengorbanan wakil rakyat untuk memperbaiki nasib mereka. Aneh jadinya kepada rakyat, para wakil ini malah meminta pamakluman. Ini contoh wakil rakyat yang tak bertanggung jawab,” tutur dia.

Seharusnya, kata Lucius, kegagalan bekerja harus diikuti sikap tanggung jawab dengan tidak kembali mengajukan diri sebagai caleg agar kalaul terpilih tidak merugikan parlemen baru. Sayangnya, anggota DPR-nya malah tak tahu malu, tak mempunyai tanggung jawab atas kegagalan dan bahkan meminta rakyat menaklumi kegagalan mereka.

“Saya kira ini penghiniaan DPR atas rakyat mereka sendiri. Rakyat diminta memahami jeblaknya kinerja DPR, sementara di saat bersamaan DPR asyik bermain politik untuk kepentingan diri sendiri dan parpolnya,” pungkask dia. [YUS/A-15]

pemilu 2019 merupakan momentum untuk memberikan hukuman kepada anggota DPR 2014-2019 ini,” tandas dia.

Untuk 2018, dari 50 daftar RUU Prioritas yang direncanakan, baru lima di antaranya yang sudah disahkan menjadi UU. Itu artinya masih ada 45 RUU Prioritas yang masih menjadi beban legislasi DPR tahun ini dan tampaknya tak mungkin bisa dikejar karena waktu yang terlalu sempit. Masa Sidang II 2018-2019 kali ini menjadi yang paling pendek, yakni 21 November-13 Desember 2018.

“Dengan catatan buruk kinerja DPR, permintaan Fadli Zon agar rakyat memahami rendahnya kinerja DPR tampaknya merupakan sebuah bentuk pengakuan yang jujur sekaligus ketidakberdayaan atau kegagalan DPR untuk bekerja,” ungkap Lucius.

Ketakterdayaan DPR tersebut tak seharusnya dibebankan kepada rakyat. Rakyat yang telah mempercayakan mandatnya kepada DPR sesungguhnya orang-orang yang penuh harap melihat wakil mereka bertkorban bagi mereka dengan kerja maksimal.